

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis di Indonesia yang ditandai dengan maraknya kegiatan usaha di seluruh sektor ekonomi membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Peningkatan kehidupan masyarakat juga diimbangi semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini juga sebagai sumber potensial yang harus digali sebagai kepentingan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak sebagai salah satu peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan negara, sehingga pajak memegang peran penting dalam bagi penerimaan negara. Sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara datur oleh undang-undang.

Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang di

tangani oleh pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah wajib pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjukkan dengan digunakan untuk pengeluaran umum.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini dasarnya adalah untuk pengenaan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. saat ini telah ada Pembaharuan Peraturan Pemerintah No. PER-03/PJK/2015 tentang Pelaporan SPT Elektronik.

Untuk mengakomodasi berbagai perkembangan yang sangat cepat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, pemerintah berupaya melakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan perpajakan yang berlaku sebelumnya, antara lain melalui kegiatan dalam bidang perdagangan dengan membuka kerja sama perdagangan dengan luar negeri dalam berbagai bidang baik barang maupun jasa.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai pajak tidak langsung, ketiga unsur pajak, yaitu penanggung jawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak dalam pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditemukan terpisah-pisah. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima. Penyetoran PPN dilakukan pembayaran ke Kantor Pos melalui SSP (Surat Setor Pajak) dan Pelaporan PPN dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT-Masa PPN).

Penulis mengambil data PPN pada PT. Bio Takara Purwokerto karena perusahaan sebagai wajib pajak sudah memenuhi syarat Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Indonesia dengan kegiatan sebagai perusahaan produksi.

Dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Bio Takara Purwokerto dilakukan oleh Bagian Keuangan (Wajib Pajak). Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

pada PT Bio Takara Purwokerto merupakan suatu prosedur yang wajib dilaksanakan dalam membantu peningkatan pembangunan negara. Hasil penerimaan pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang tahun 2003.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN pada PT. Bio Takara Purwokerto. Dari pelaksanaan kerja praktek ini diharapkan mahasiswa mampu menilai dan membandingkan kesesuaian tentang penerapan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan teori yang didapat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu apa dan bagaimana prosedur pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bio Takara.

C. Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek

1. Tujuan kerja praktek
 - a. Untuk memperoleh gambaran nyata tentang penerapan dan ilmu atau teori yang penulis terima selama mengikuti perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada dilapangan.

- b. Untuk mengetahui apa dan bagaimana prosedur pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada PT. Bio Takara.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian study program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

2. Manfaat kerja praktek

a. Bagi Penulis

- 1) Guna menambah ilmu wawasan bagi penulis khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Guna menambah pengalaman bagi penulis untuk terjun ke dunia kerja sebenarnya
- 3) Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui masalah prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN

b. Bagi perusahaan atau instansi

Dengan adanya praktek diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan yang berguna bagi perusahaan yang bersangkutan.

c. Bagi masyarakat

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk menyusun laporan kerja praktek dalam metode pengumpulan data yaitu :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat kerja praktek.

Data tersebut dapat diperoleh melalui :

a. Metode interview

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pimpinan atau pihak yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

b. Observasi

Diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan atau instansi tempat kerja praktek.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara menyalin dan mengutip arsip atau dokumen yang sudah tersedia diperusahaan.

a. Dokumentasi

Yaitu data dari perusahaan yang bersangkutan.

b. Studi pustaka

Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan buku dan literature-literatur yang berisi teori yang relevan yang digunakan untuk menyusun kerangka dan konsep dalam laporan.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengolah hasil-hasil data primer dan sekunder.

E. Prosedur pelaksanaan kerja praktek

Prosedur pelaksanaan kerja praktek yaitu:

1. Tahap persiapan

- a. Mengajukan usulan kerja praktek kepada ketua program studi akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- b. Mengurus perijinan ketempat instansi kerja praktek.
- c. Memperkenalkan diri pada instansi kerja praktek terkait dan menjelaskan maksud dan tujuan kerja praktek.
- d. Melaksanakan kerja praktek sesuai dengan jadwal kegiatan kerja praktek.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Tempat kerja praktek : PT. Bio Takara Purwokerto
- b. Waktu pelaksanaan kerja praktek : 1 Maret 2016 s.d 1 Mei 2016
- c. Bagian : Payrol (Keuangan)

Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

No	Keterangan	Februari 2015		Maret 2015				April 2015				Mei 2015			
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahap Persiapan														
	a. Mengajukan judul														
	b. Mengurus perijinan pada PT. Bio Takara														
2.	Tahap pelaksanaan														
	a. Orientasi pada PT. Bio Takara														
	b. Mempelajari sejarah dan visi-misi PT. Bio Takara														
	c. Mempelajari struktur organisasi PT. Bio Takara														
	d. Mempelajari dan memperoleh informasi tentang bukti pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN														
	e. Mengarsip dan mencatat data-data														

